

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS BINA MARGA KOTA MAKASSAR.

Hasliah

Bakri

Bakriri91@yahoo.com

Dosen STIE –LPI Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah laporan keuangan pemerintahan daerah pada dinas bina marga kota Makassar telah sesuai dengan peraturan menteri No 24 Tahun 2005 tentang standar pemerintah menteri dalam negeri No 13 Tahun 2006.

Hasil Penelitian ini pada Dinas Bina Marga Kota Makassar (PU) dalam mempertanggungjawabkan keuangan tidak menyajikan laporan realisasi anggaran saja karena hanya melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.

Kata kunci : Laporan Keuangan, Pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Berkembangnya reformasi di Indonesia saat ini telah membuka suatu wawasan baru mengenai kewenangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintahan, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Dengan terpisahnya system pengelolaan keuangan dan banyaknya pemekaran wilayah baru membuat sistematis pemerintahan juga mengalami perubahan, khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pembuat keputusan dipemerintah.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat, untuk itu diperlukan akuntansi yang berbeda dengan akuntansi komersial pada umumnya, lembaga pemerintahan harus menyediakan sumber-sumber tertentu dengan suka rela dan memungut iuran dari masyarakat dalam bentuk pajak yang diurus secara efektif dan digunakan untuk pelayanan yang bermanfaat. Meningkatnya ketertarikan terhadap transparansi dan akuntabilitas, mengakibatkan peran akuntansi dalam pemerintahan di lingkungan sector public juga semakin meningkat. Penggunaan akuntansi selama ini hanya diterapkan secara utuh, pada organisasi sector swasta. Hal ini disebabkan karena banyaknya aparat pemerintah yang belum begitu memahami arti penting dari akuntansi pemerintah, baik dari segi ilmu maupun dari segi praktek.

Untuk merelaksasikannya, pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yakni undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Setelah keluarnya undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan pelaksanaan yaitu diantaranya adalah : peraturan Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan sekarang sudah direvisi menjadi peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system keuangan pemerintah daerah sebagai proses pencatatan pengelolaan. Dan pengkritisiran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umum bersifat keuangan termasuk pelaporan-pelaporan atas realisasi penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia.

Dinas bina marga kota Makassar dalam mempertanggungjawabkan keuangan hanya menyajikan laporan realisasi anggaran saja karena dinas bina marga kota Makassar tidak melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut "Apakah laporan keuangan pemerintah pada dinas bina marga kota Makassar sesuai dengan peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah menteri dalam negeri No.13 Tahun 2006"

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelitian laporan keuangan beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi usaha pada masa lalu dan sekarang. Menurut Soemarso S.R (1996), analisis laporan keuangan adalah hubungan antara suatu angka dalam suatu laporan keuangan dengan angka yang lain yang mempunyai makna/penjelasan arah perubahan (trend) suatu fenomena. Angka-angka dalam laporan keuangan akan sedikit artinya kalau dilihat secara sendiri-sendiri. Dengan analisis pemakaian laporan keuangan akan lebih mudah menginterpretasikannya.

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Laporan Keuangan Pemerintah

Kieso dkk. (2002:3) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan sarana pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan ini melampirkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dalam nilai moneter.

Pelaporan keuangan adalah catatan informasi tambahan atas laporan keuangan dari suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pelaporan keuangan dapat dikatakan sebagai data juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi informasi jika diubah kedalam konteks yang memberikan makna (Anonim, 2010:10). Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 1) adalah : "Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas". Pengertian laporan keuangan lainnya yang diungkapkan oleh Munawir (2010:2), laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan/instansi pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dinas Bina Marga Kota Makassar dalam mempertanggungjawabkan keuangan hanya menyajikan laporan realisasi anggaran saja karena Dinas Bina Marga (PU) tidak melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas, dan catatan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari : pendapatan , belanja , pembiayaan, neraca dan catatan laporan keuangan.

Unsur Laporan Keuangan

Menurut peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari :

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang diperoleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara dan realisasinya anggaran terdiri dari dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan (peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 pernyataan No 1 paragraf 33).

Laporan Posisi Keuangan/Neraca,. Pernyataan standar akuntansi pemerintah 01 paragraf 38 dalam peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuatis dana pada periode tertentu. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran tentang suatu entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas

tersebut, sehingga neraca sering disebut sebagai potret estitas.

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis ini menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara peraktek dan teori yang ada. Kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk skripsi. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungan pemerintah daerah. Perhitungan analisis rasio pertumbuhan APBD dan perhitungan efektifitas .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisa Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dinas Bina Marga (PU) Kota Makassar dalam mempertanggungjawabkan keuangan tidak menyajikan laporan realisasi anggaran saja karena dinas bina marga kota Makassar hanya melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang standat akuntansi pemerintah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan dokumen yang disampaikan kepala daerah dihadapan siding paripurna DPRD sebagai penghantar perhitungan APBD. Laporan realisasi anggaran pada dasarnya memuat tentang kinerja keungan daerah dan ringkasan realisasi APBD yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

2. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi. Didalam laporan ini perubahan posisi akan dilihat dari tiga sisi yaitu operasi, pendanaan dan investasi. Berikut laporan arus kas Dinas Bina Marga Kota Makassar Tahun Anggaran 2017-2018.

Tabel I
Dinas Bina Marga
LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2018

N0	Uraian	2017	2018
1	Arus kas dari aktifitas operasi		
2	Arus kas masuk		
3	Pendapatan pajak daerah	3.451.383.503,50	587.708.989,00
4	Pendapatan retribusi daerah	0	851.577.500,00
5	pendapatan hasil penegelolaan kekayaan daerah yang diserahkan	0	0
6	lain-lain PAD yang sah	0	0
7	Dana bagi hasil pajak	0	0
8	Dana bagi hasil sumber daya alam	0	0
9	Dana alokasi umu	0	0
10	Dana alokasi khusus	0	0
11	Dana otonomi khusus	0	0
12	Dana penyesuaian	0	0
13	Pendapatan bagi hasil pajak	0	0
14	Pendapatan bagi hasil lainnya	0	0
15	Pendapatan hibah	0	0
16	Pendapatan dana darurat	0	0
17	pendapatan lainnya	0	0
18		0	0
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
20	Hibah	0	0
21	Dana darurat	0	0
22	Lainnya	0	0
23	Jumlah arus kas masuk	3.451.383.503,50	1,439.286.489

24			
25	Arus keluar kas dari aktivitas operasi		
26	Belanja pegawai	7.404.316.349,00	9.234.192.004,00
27	Belanja barang	27.073.686.620,21	23.755.256.722,05
28	Belanja bunga	0	0
29	Belanja subsidi	0	0
30	Belanja hibah	0	0
31	Belanja bantuan social	0	0
32	Arus keluar kas dari aktivitas investasi asset non keuangan		
33	Belanja tanah	480.807.000,00	0
34	Belanja peralatan dan mesin	657.891.100,00	1.537.465.000,00
35	Belanja gedung dan bangunan	74.069.025.034,01	59.900.168.200,40
36	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	107.282.737.784,17	150.091.781.908,55
37	Belanja asset tetap lainnya	11.665.000,00	4.918.000,00
38	Belanja asset lainnya	204.282.000,00	47.190.300,00
39	BELANJA TAK TERDUGA	0	0
40	TOTAL BELANJA	217.184.647.887,39	244.570.972.135,00
41	SURFULS/DEFISIT	(213.733.291.383,89)	(243.131.685.646,00)

Sumber : Data olahan tahun anggaran ,2019

Laporan Posisi Keuangan/Neraca

Laporan neraca melaporkan yang memberikan gambaran yang utuh suatu estitas (pemerintah daerah) pada suatu titik waktu. Dalam neraca akan menggambarkan elemen-elemen yang menyusun estitas tersebut. Sehingga neraca sering disebut sebagai potret keuangan suatu stitas. Berikut laporan neraca Dinas Bina Marga Kota Makassar tahun anggaran 2017-2018

Tabel. II
Dinas Bina Marga
NERACA
Per 31 Desember 2018

NO	Uraian	2017	2018
1	ASSET		
2	ASSET LANCAR		
3	Kas di daerah	0	0
4	Kas di bendaharan pendaharan	16.732.0098,00	196.576.645.00
5	Kas dibendahara penerimaan	0	0
6	Investasi jangka pendek	0	0
7	Piutang pajak	0	0
8	Piutang retribusi	0	0
9	Bagian lancer pinjaman	0	0
10	Bagian lancer tagihan penjualan angsuran	0	0
11	Bagian lancer TT/VRR	0	0
12	Piutang lainnya	0	0
13	Persediaan	529.314.180,00	377.190.512,13
14	Jumlah asset lancer	546.046.278,00	573.767.158,13
15	INVESTASI JANGKA PANJANG		

16	Investasi nonpermanent		
17	Pinjaman kepada perusahaan Negara	0	0
18	Pinjaman kepada perusahaan daerah	0	0
19	Pinjaman kepada daerah lainnya	0	0
20	Investasi dalam surat utang Negara	0	0
21	Investasi dalam proyek pembangunan	0	0
22	Investasi nonpermanent lainnya	0	0
23	Jumlah investasi nonpermanent	0	0
24	Investasi permanen	0	0
25	Pernyataan modal pemerintah daerah	0	0
26	Investasi permanen lainnya	0	0
27	Jumlah investasi permanen	0	0
28	Jumlah investasi jangka panjang	0	0
29	ASSET TETAP		
30	Tanah	796.777.000,00	796.777.000,00
31	Peralatan dan mesin	3.983.032.880,00	7.427.529.980,00
32	Gedung dan bangunan	76.573.469.889,47	225.415054.192,00
33	Jalan, irigasi dan jaringan	103.688.523.731,52	354.104.334.795,00
34	Aset tetap lainnya	184.969.000,00	184.969.000,00
35	Konstruksi dalam pengerjaan	228.874.818.370,00	46.501.538.032,39
36			
37			
38	Jumlah aset tetap	414.062.650.871,36	634.430.203.000,00
39	DANA CADANGAN		
40	Dana cadangan	0	0
41	Jumlah dana cadangan	0	0
42	ASSET LAINNYA		
43	Tagihan penjualan angsuran		
44	Tuntunan pembendaharaan ganti rugi	0	0
45	Kemitraan dengan pihak ketiga	0	0
46	Asset tak berwujud	0	0
47	Asset lainnya	0	0
48	Jumlah aset lainnya	0	0
49	Jumlah aset	414.608.697.149,36	635.003.970.158,00
50			
51	KEWAJIBAN		
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
53	Utang PFK	0	0
54	Utang bunga	0	0
55	Bagian lancar utang jangka pendek	0	0
56	Bagian lancar utang jangka	0	0

	pendek lainnya		
57	Utang jangka pendek lainnya	0	0
58	Jumlah kewajiban jangka panjang	0	0
59	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
60	Utang dalam negeri-pemerintah pusat	0	0
61	Utang kepada negeri-pemerintah daerah lainnya	0	0
62	Utang kepada –lembaga keuangan bank	0	0
63	Utang dalam negeri –lembaga keuangan non bank	0	0
64	Utang dalam negeri-obligasi	0	0
65	Utang jangka panjang lainnya	0	0
66	Jumlah kewajiban jangka panjang	0	0
67			
68	EKUITAS DANA		
69	EKUITAS DAN LANCAR		
70	Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA)	-213.733.291.382,89	-243.131.685.646,00
71	Pendapatan yang ditangguhkan	0	0
72	Cadangan piutang	0	0
73	Cadangan persediaan	529.314.180,00	377.190.513.13
74	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	0	0
75	Jumlah ekuitas dana lancar	-242.752.493.132,00	-213.203.977.203,89
76	EKUITAS DANA INVESTASI		
77	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	0	0
78	Diinvestasikan dalam asset tetap	414.062.650.871,00	463.430.203.000,74
79	Diinvestasikan dalam asset lainnya	0	0
80	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran untuk utang jangka panjang	0	0
81	Jumlah ekuitas dana investasi	414.062.650.871,00	634.430.203.000,74
82	RKPPD		
83	RKPPD	213.750.023.481,89	243.382.262.291,00
84	Jumlah RKPPD	213.750.023.481,89	243.382.262.291,00
85	JUMLAH EKUITAS DANA	414.608.679,149,36	635.003.970.158,87
86	JUMLAH UTANG DAN EKUITAS DAN	414.608.679.149,36	635.003.970.158,87

Sumber : Data Olahan Tahun Anggaran 2019

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Untuk membuat suatu gambaran tentang kinerja laporan keuangan pemerintah daerah harus mengetahui APBD pemerintah daerah yang berisi tentang jumlah pendapatan asli daerah selama

satu tahun anggaran.

Analisis Rasio Pertumbuhan APBD ,Rasio pertumbuhan adalah alat untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari priode ke priode brikutnya.Ini dapat dilihat dengan membandingkan persentase priode tahun terakhir dan tahun sebelumnya.

Tabel III
Rasio Pertumbuhan APBD
Tahun Anggaran 2017-2018

No	Keterangan	2017	2018	% Pertumbuhan
1	Pendapatan Asli Daerah	26.536.771.150	41.237.624.301	155.53%
2	Total Pendapatan	715.454.350.521	786.351.901.842	109.90%

Sumber : Data Olahan APBD Tahun Anggaran,2019

Berikut adalah perhitungan analisis rasio pertumbuhan APBD.

- a. Rasio Pertumbuhan PAD terhadap APBD
 $= \frac{41.273.624.301}{26.536.771.150} \times 100\% = 155.53\%$
- b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Terhadap APBD
 $= \frac{786.351.901.842}{715.454.350521} \times 100\% = 109.90\%$

Berdasarkan tabel III dapat dilihat bahwa pertumbuhan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2017-2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun cenderung pertumbuhan dalam pendapatan berkurang.

Analisis Terhadap Laporan Keuangan

Pada Laporan Kegiatan terdapat nilai kontrak dengan jumlah nominal sebesar Rp 283.717.358.906,30 sedangkan realisasinya hanya Rp 205.177.162.742,75. Berarti target yang telah ditetapkan pada nilai kontrak tidak bisa tercapai.Berikut adalah perhitungan efektifitas dan nilai kontak pada laporan kegiatan Dinas Bina Marga Kota Makassar

$$\text{efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Nilai kontrak}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas nilai kontrak pada pelaporan kegiatan :

$$\text{Efektifitas} = \frac{205.177.162.742,75}{283.717.359.906,30} \times 100\% = 72.32\%$$

Dari hasil perhitungan diatas diketahui bahwa realisasi keuangan terhadap nilai kontrak adalah sebesar 72.32 %, berarti terdapat selisih persentase 27,68 % hal ini disebabkan beberapa factor penghambat sebagai berikut :

1. Factor alam atau lingkungan yang menyebabkan proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan seperti terjadi banjir dilokasi pembanguana proyek.
2. Masyarakat tidak bisah menerima dengan adanya membangunan tersebut.
3. Disebabkan karena putus kontrak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka dapat disimpulkan bahwa :Dinas Bina Marga Kota Makassar (PU) dalam mempertanggungjawabkan keuangan tidak menyajikan laporan realisasi anggaran saja karena hanya melakukan penyusunan neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.Hal ini tidak sesuai dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pememrintah.

Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat laporan keuangan seperti seperti yang diatur pada pemerintah standar akuntansi pemerintahan Dinas Bina Marga Kota Makassar harus membuat neraca yang menggambarkan nilai aktiva dan pasiva, hutang dan modal pada suatu periode tertentu.
2. Sebaiknya aparatur Dinas Bina Marga Kota Makassar harus dilatih dalam menerapkan laporan keuangan pemerintah sehingga laporan keuangan pemerintah kota makassar dapat disajikan dengan tepat dan sesuai perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahtiar, alhif, mhulis, iskandar, 2002, *Akutansi pemerintah*, salemba empat. Informasi dan data *Analisi laporan keuangan pemerintah* Dinas bina Marga Kota Makassar

Kieso. Donald E 2002. *Akuntansi intermediete*. Erlangga, Jakarta.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi sector public* .andi offset, yogyakarta.

Sabeni, arifin, 2001, *pokok-pokok keuangan akuntansi pemerintah*. BPFE, Jakarta.

Syafri harapan, sofian. 2014. *Teori akuntansi laporan keuangan, edisi 1, cet 3*. Bumi Askara. Jakarta.

Syafri harapan, sofian. 2015. *Akuntansi aktiva tetap. Edidi 1 cetakan 4*. PT.Raja Gravindo, Jakarta.

Tanjung abdul haris 2004 *Akuntansi keuangan daerah, salemba empat, Jakarta*.

Peraturan

Peraturan laporan keuangan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *Laporan keuangan pememrintah*

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *pedoman pengelolaan pemerintah pusat dan daerah*

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang *standar Akuntansipemerintah focus media*

Perstursn pemerintah. Nomor 56 Tahun 2005 Tentang *Sistem informasi keuangan daerah*.